

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis framing terhadap 15 berita Tempo mengenai berita yang terkait dengan tag Indonesia Gelap penelitian ini menyimpulkan bahwa Tempo tidak hanya sekadar menyampaikan peristiwa demonstrasi, melainkan membungkai dan mengonstruksi makna sosial dari aksi tersebut.

Melalui analisis framing Robert N. Entman yakni pendefinisian masalah, memperkirakan penyebab masalah, membuat penilaian moral, dan memberikan solusi. Dalam aspek pendefinisian masalah (*define problems*), Tempo mendefinisikan aksi Indonesia Gelap sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan negara yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan minimnya respons pemerintah. Aksi ini sebagai simbol ketegangan struktural antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Pendefinisian ini terlihat dari isu kebijakan, kritik mahasiswa, serta keberlanjutan aksi di berbagai daerah.

Pada aspek kedua yaitu memperkirakan penyebab masalah (*diagnose causes*), Tempo secara konsisten memberitakan aksi Indonesia Gelap dengan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran, ketertutupan pemerintah terhadap kritik, serta jarak antara pemerintah dan masyarakat. Negara dan pemerintah ditempatkan sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam memicu ketidakpuasan publik, sementara masyarakat diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

Dalam aspek membuat penilaian moral (*make moral judgments*), Tempo cenderung memberikan ruang terhadap kritik dan aksi masyarakat sipil. Kritik mahasiswa, orasi lapangan, serta simbol perlawanan masyarakat ditampilkan sebagai respons yang masuk akal dan bermakna. Sebaliknya, respons pemerintah ditampilkan bersifat defensif, penyangkalan, dan minim dialog dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Tempo membangun penilaian moral yang berpihak pada prinsip pengawasan terhadap kekuasaan.

Sementara itu, dalam aspek memberi solusi (*treatment recommendations*), Tempo secara tidak langsung mendorong pentingnya dialog pemerintah dengan masyarakat, keterbukaan negara terhadap kritik, dan perbaikan kebijakan publik. Berita yang dianalisis membentuk pemahaman bahwa respons negara yang represif, abai, dan defensif terhadap kritik memiliki potensi memperdalam ketegangan sosial.

Tempo juga berperan dalam proses eksternalisasi dengan menampilkan kritik, tuntutan, dan simbol perlawanan sebagai ekspresi masyarakat. Selanjutnya, melalui pengulangan isu dan legitimasi pakar, Tempo melakukan objektivasi, di mana aksi Indonesia Gelap dipahami sebagai realitas sosial yang bermakna. Pada tahap internalisasi, pembaca diarahkan untuk memahami aksi tersebut sebagai bentuk masalah struktural.

Dalam kerangka Teori Hirarki Pengaruh Isi Media oleh Shoemaker & Reese (2014), penelitian ini konstruksi realitas Tempo dipengaruhi oleh berbagai level. Pada level individu dan rutinitas media, jurnalis dan mekanisme redaksi membentuk narasi yang berkelanjutan. Pada level organisasi media, orientasi

Tempo menentukan arah liputan yang konsisten memprioritaskan suara masyarakat sipil. Pada level ekstra media, tekanan publik, respons pemerintah, memengaruhi fokus pemberitaan. Terakhir pada level ideologi, di mana Tempo menegaskan bahwa kekuasaan negara harus berada dalam pengawasan publik dan terbuka terhadap kritik.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembingkaian berita Tempo terhadap tag Indonesia Gelap bukan konstruksi yang netral, melainkan representasi realitas sosial yang dibentuk melalui nilai, kepentingan, dan posisi ideologi media. Tempo membungkai berita Indonesia Gelap sebagai simbol kritik terhadap pemerintah dan kekuasaan.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh, terlihat dari Tempo memiliki perspektif dan framing tersendiri pada setiap pemberitaan terkait dengan tag berita Indonesia Gelap. Dengan adanya temuan tersebut peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Tempo terus mempertahankan kebebasan redaksi dan investasi pada jurnalisme investigatif dan kritis yang menjadi keunggulannya, namun tetap menjaga keseimbangan antara sikap kritis dengan keadilan agar tidak berubah menjadi bias yang sistematis.
2. Masyarakat perlu mengembangkan literasi media dengan memahami bagaimana pembingkaian berita, mengenali kepentingan di balik media yang dikonsumsi, dan tidak menelan mentah-mentah narasi media tanpa pemeriksaan dari sumber lain.